

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/byjpde10>

EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN PARTISIPATIF DALAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN KERTAPATI KOTA PALEMBANG

Aris Munandar¹, Masayu Adiah², Lies Nur Intan³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang¹⁻³

email korespondensi: rmasayu.adijah70@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan kesehatan lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif dalam peningkatan kesehatan lingkungan di Kelurahan Kertapati Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan partisipatif telah berjalan cukup efektif melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kesehatan lingkungan. Koordinasi kelembagaan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat mendukung pelaksanaan program kesehatan lingkungan secara kolaboratif. Program kesehatan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sanitasi lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Namun, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat pada kelompok tertentu, serta keterbatasan koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah kelurahan, peningkatan literasi kesehatan lingkungan masyarakat, serta pengembangan program berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan partisipatif.

Kata Kunci: Apemerintahan partisipatif, kesehatan lingkungan, partisipasi masyarakat, efektivitas pemerintahan, tata kelola publik.

1. PENDAHULUAN

Kesehatan lingkungan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang sehat dan berkelanjutan. Kesehatan lingkungan mencakup kondisi sanitasi, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta pengendalian pencemaran lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan kesehatan lingkungan tidak

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan partisipatif (WHO, 2018). Kelurahan Kertapati Kota Palembang merupakan wilayah perkotaan yang menghadapi berbagai permasalahan kesehatan lingkungan, seperti pengelolaan sampah rumah tangga, sanitasi lingkungan, serta kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Permasalahan tersebut memerlukan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pemerintah dalam pengelolaan kesehatan lingkungan. Pemerintah kelurahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam kesehatan lingkungan, kajian yang secara khusus menyoroti efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif dalam peningkatan kesehatan lingkungan pada tingkat kelurahan masih terbatas, khususnya di Kelurahan Kertapati Kota Palembang. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan partisipatif mampu meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif dalam peningkatan kesehatan lingkungan di Kelurahan Kertapati Kota Palembang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kesehatan lingkungan, serta mengevaluasi peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian pemerintahan partisipatif serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam penguatan tata kelola kesehatan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif dalam peningkatan kesehatan lingkungan di Kelurahan Kertapati Kota Palembang. Subjek penelitian meliputi aparat pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan, petugas kesehatan lingkungan, serta masyarakat yang terlibat dalam program pengelolaan kesehatan lingkungan. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan informan dalam program kesehatan lingkungan (Creswell Creswell, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi program kesehatan lingkungan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode penelitian (Sugiyono, 2020). Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui teknik member check untuk memastikan kesesuaian interpretasi data dengan informan penelitian (Lincoln Guba, 1985). Metode penelitian ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif dalam pengelolaan kesehatan lingkungan serta mendukung pencapaian tujuan penelitian

3. TINJAUAN LITERATUR

Pemerintahan partisipatif merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip utama dalam good governance yang bertujuan meningkatkan efektivitas kebijakan publik serta memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemerintahan (Rhodes, 2017).

Dalam perspektif administrasi publik, partisipasi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan kesehatan lingkungan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan program kesehatan lingkungan. Penelitian Sari dan Nugroho (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program sanitasi lingkungan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian Rahman dan Putra (2021) menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat meningkatkan efektivitas pengelolaan kesehatan lingkungan. Selain itu, penelitian Wibowo dan Santoso (2022) menunjukkan bahwa pemerintahan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kerangka konseptual penelitian disusun untuk mengarahkan analisis terhadap hubungan antarunsur utama yang telah diuraikan dalam penelitian. Secara konseptual, kerangka penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Pemerintahan Partisipatif → Keterlibatan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan → Kesehatan Lingkungan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Partisipatif dalam Peningkatan Kesehatan Lingkungan di Kelurahan Kertapati Kota Palembang Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif dalam peningkatan kesehatan lingkungan merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola program pembangunan berbasis masyarakat. Dalam penelitian ini, efektivitas dianalisis menggunakan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Steers (2020), yang menekankan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh pencapaian tujuan program, integrasi kelembagaan, serta adaptasi organisasi terhadap kebutuhan lingkungan. Selain itu, analisis partisipasi masyarakat menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein (2019), yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta pengawasan kebijakan publik. Penyelenggaraan pemerintahan partisipatif dalam pengelolaan kesehatan lingkungan juga didukung oleh regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program Kesehatan Lingkungan Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan program kesehatan lingkungan di Kelurahan Kertapati telah dilakukan melalui forum musyawarah kelurahan dan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pengelolaan kesehatan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, sanitasi lingkungan, dan penyediaan fasilitas air bersih. Berdasarkan teori partisipasi masyarakat Arnstein (2019), keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan merupakan salah satu bentuk partisipasi yang menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program kesehatan lingkungan menunjukkan adanya upaya pemerintah kelurahan dalam menerapkan prinsip pemerintahan partisipatif. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Nugroho (2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan program sanitasi lingkungan meningkatkan keberhasilan implementasi program kesehatan lingkungan. Penelitian lain oleh UNDP (2022) juga menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan berbasis partisipasi

masyarakat meningkatkan efektivitas program pembangunan kesehatan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan program masih bersifat partisipasi konsultatif, di mana masyarakat lebih banyak berperan sebagai pemberi masukan, sementara pengambilan keputusan masih didominasi oleh pemerintah kelurahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih berada pada tahap partisipasi simbolik, sehingga perlu dilakukan penguatan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan di Kelurahan Kertapati diwujudkan melalui kegiatan kerja bakti lingkungan, pengelolaan bank sampah, serta program sanitasi berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menurut teori efektivitas organisasi Steers (2020), keberhasilan pelaksanaan program pembangunan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktor pelaksana program. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan telah berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan kesehatan lingkungan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Putra (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan meningkatkan keberlanjutan program pembangunan. Penelitian World Bank (2021) juga menunjukkan bahwa program kesehatan lingkungan berbasis masyarakat lebih efektif dibandingkan program pembangunan yang bersifat top-down. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah. Sebagian masyarakat masih menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah akibat kurangnya pemahaman terhadap pentingnya kesehatan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan edukasi masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan.

3. Koordinasi Kelembagaan Pemerintahan dan Masyarakat Koordinasi kelembagaan antara pemerintah kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan telah berjalan cukup baik dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan lingkungan. Koordinasi kelembagaan dilakukan melalui forum komunikasi masyarakat, rapat koordinasi program kesehatan lingkungan, serta kerja sama dengan puskesmas dan organisasi masyarakat. Koordinasi tersebut menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kesehatan lingkungan. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2018), yang menyatakan bahwa kolaborasi antar aktor pemerintahan dan masyarakat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Penelitian OECD (2020) juga menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pembangunan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi kelembagaan masih menghadapi kendala dalam komunikasi antar lembaga masyarakat. Keterbatasan koordinasi antar kelompok masyarakat menyebabkan pelaksanaan program kesehatan lingkungan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kelembagaan menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif.

4. Pengawasan Partisipatif terhadap Program Kesehatan Lingkungan Pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Kertapati telah berperan dalam pengawasan pelaksanaan program kesehatan lingkungan melalui kegiatan monitoring kebersihan lingkungan dan pelaporan kondisi lingkungan kepada pemerintah kelurahan. Menurut teori partisipasi masyarakat Arnstein (2019), pengawasan partisipatif menunjukkan

tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi karena masyarakat memiliki peran dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan partisipatif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahmudi (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan partisipatif meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian LAN RI (2021) juga menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan partisipatif masih menghadapi kendala dalam keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengawasan kebijakan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif.

5. Dampak Program terhadap Kualitas Kesehatan Lingkungan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan partisipatif dalam pengelolaan kesehatan lingkungan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan masyarakat. Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, peningkatan sanitasi lingkungan, serta program edukasi kesehatan lingkungan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Menurut teori efektivitas organisasi Steers (2020), keberhasilan program pembangunan dapat diukur melalui dampak program terhadap kondisi sosial masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menunjukkan bahwa program pemerintahan partisipatif telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Wibowo dan Santoso (2022) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Penelitian WHO (2018) juga menunjukkan bahwa program kesehatan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak program kesehatan lingkungan masih memerlukan penguatan keberlanjutan program. Beberapa program kesehatan lingkungan masih bergantung pada dukungan pemerintah sehingga keberlanjutan program menjadi tantangan dalam pengelolaan kesehatan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan pemerintahan partisipatif dalam peningkatan kesehatan lingkungan di Kelurahan Kertapati menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kesehatan lingkungan menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan partisipatif. Namun demikian, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah kelurahan, tingkat kesadaran masyarakat, serta koordinasi antar lembaga masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan literasi masyarakat terhadap kebijakan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan partisipatif memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat. Namun, penguatan sistem pemerintahan partisipatif melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan program kesehatan lingkungan berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif.

5. KESIMPULAN

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif dalam peningkatan kesehatan lingkungan di Kelurahan Kertapati Kota Palembang menunjukkan capaian yang cukup baik melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kesehatan lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program kesehatan lingkungan telah memberikan ruang bagi masyarakat

untuk menyampaikan aspirasi dalam penyusunan program pembangunan berbasis kebutuhan lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan berbasis komunitas. Koordinasi kelembagaan antara pemerintah kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat telah mendukung pelaksanaan program kesehatan lingkungan secara kolaboratif. Selain itu, pengawasan partisipatif masyarakat terhadap program kesehatan lingkungan telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan. Program kesehatan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sanitasi dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Namun demikian, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif masih menghadapi beberapa kendala, seperti tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata, keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah kelurahan, serta keterbatasan koordinasi antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan edukasi masyarakat, serta pengembangan program kesehatan lingkungan berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan partisipatif dalam pengelolaan kesehatan lingkungan.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ansell, C., Gash, A. (2018). Collaborative governance regimes. Washington, DC: Georgetown University Press.
2. Arnstein, S. R. (2019). A ladder of citizen participation. New York, NY: Routledge.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Pembangunan partisipatif berbasis masyarakat. Jakarta: BAPPENAS.
4. Creswell, J. W., Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
5. Halim, A. (2021). Manajemen sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman kesehatan lingkungan berbasis masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
7. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Pedoman lembaga kemasyarakatan kelurahan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
8. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). Tata kelola pemerintahan partisipatif. Jakarta: LAN RI.
9. Lincoln, Y. S., Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
10. Mahmudi. (2020). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

11. Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: ANDI.
12. Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
13. Nasution, A. (2020). Akuntabilitas sektor publik. Jakarta: Bumi Aksara.
14. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Governance responses to COVID-19. Paris: OECD Publishing.
15. Prasajo, E. (2017). Reformasi tata kelola pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group.
16. Rahman, A., Putra, H. (2021). Collaborative governance in environmental management. *Journal of Public Administration Studies*, 7(1), 45–60.
17. Rhodes, R. A. W. (2017). Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity, and accountability. London, UK: Open University Press.
18. Sari, D., Nugroho, R. (2019). Community participation in environmental health programs. *Journal of Public Policy and Governance*, 5(2), 67–82.
19. Setyawan, B. (2023). Strategi tata kelola pemerintahan publik. Yogyakarta: Deepublish.
20. Steers, R. M. (2020). Organizational effectiveness: A behavioral view. New York, NY: Routledge.
21. Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
22. United Nations Development Programme. (2022). Community governance report. New York, NY: UNDP.
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
25. Widodo, J. (2019). Analisis kebijakan publik. Malang: Bayumedia Publishing.
26. World Bank. (2021). Local governance and community participation. Washington, DC: World Bank Publications.
27. World Health Organization. (2018). Environmental health governance. Geneva: WHO Press.